

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.²⁸

Kinerja Keuangan adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan.

²⁸ Fahmi Dan Irham, “ Analisis Kinerja Keuangan” Bandung: Alfabeta

²⁹ Jumingan, “ Analisis Laporan Keuangan “. Jakarta: Bumi Aksara

2. Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ada 5 tahap dalam menganalisis Kinerja Keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:³⁰

- a) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.\

Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Melakukan Perhitungan

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- c) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah di peroleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

- d) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

³⁰ Juliawati, Ebit, Darwanis Dan Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh", Tesis. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh

Pada tahapan ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut dilanjutkan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dari kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.

- e) Mencari dan memberikan pencerahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi untuk memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadikan kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Pada pemerintah daerah tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat dan komperhensif adalah:

- 1) Menyiapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran, yaitu data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode.
- 2) Membandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun

pembiayaan. Untuk memperoleh hasil objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.

- 3) Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (*variance*), selisih ini dikelompokkan menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (*surplus*) atau selisih kurang (*defisit*) anggaran.
- 4) Menghitung persentase tingkat keberhasilan anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun perhitungan.
- 5) Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisien, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas: faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang diantara keduanya tidak lepas dari organisasional (*organizational factor*).³¹ Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri atas revenue, expenditure, operating position, debt structure, unfunded liabilities, dan condition of capital fund yang masing-masing dari variabel tersebut terbagi lagi atas sub variabel yang mempengaruhi di dalamnya. Faktor lingkungan (*environmental factors*) yang juga mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas community need and resources, external economic conditions, inter-governmental constrains natural disaster and emergiencies, dan political cultures. Faktor organisasional (*organizational factors*) yaitu terdiri atas kebijakan legislatif dan praktik manajemen. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh baik faktor keuangan, faktor lingkungan maupun faktor organisasional yang dapat di monitoring melalui *Financial Trend Monitoring System (FTMS)*.

Beberapa Faktor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan *study empiris* pada Kota dan Kabupaten di Provonsi Jawa Timur Tahun

³¹ Ningsih Dan Ayu, “ Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, Dan IPM Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Daerah Otonom Baru Di Indonesia” Thesis. Universitas Sebelas Maret

2016-2020 antara lain adalah Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.³²

4. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah menurut Mahsun (2013: 196). Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:³³

a. Indikator Masukan (*inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan

³² Nograho Dan Fajar “ Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)” Jurnal. Universitas Diponegoro

³³ Mahsun. M, “Pengukuran Kinerja Sektor Publik” Penerbit BPFE: Yogyakarta

kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

5. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang.³⁴ Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawab keuangan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara otonomis, efisien dan efektif. Masyarakat tentunya tidak mau terus-menerus ditarik pungutan, sementara pelayanan yang mereka terima tidak

³⁴ Patriati Dan Ranti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah" Jurnal, Universitas Sebelas Maret

ada kualitas dan kuantitasnya. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, menganalisis rasio keuangan APBD dilaksanakan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Berikut bentuk-bentuk rasio keuangan.³⁵

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.³⁶

b. Rasio Efektivitas PAD

³⁵ Puspitanigrum Dan Merynda, "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi DIY Dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sebagai Variabel Intervening" Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta

³⁶ Azis Dan Asmaul, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)", EKSIS, Vol, XI, No. 1

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

c. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.³⁷

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananyapada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

e. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

³⁷ Fauza Dan Nailatul, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiri Pada Pemerintah Daerah Se Sumatera), Jom FEKON, Vol. 1 No. 2

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

f. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasiumum setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.³⁸

B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

³⁸ Imawan, Riswanda Dan Agus Wahyudin, “ Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012”, Accounting Analysis Jurnal, Vol. 3 No.2

tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.³⁹

Berdasarkan Pendapat mengenai pengertian belanja modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

2. Peran Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 dinyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran

³⁹ Masdaiantini, Putu Riesty Dan Ni Made Adi Erawati, “ Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, iritasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.⁴⁰

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan persyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasaran, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dalam pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

⁴⁰ Heryanti, C.D, Wahidahwati, W, Dan Suryono, B, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”, Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, No. 3 Hlm. 98-116

3. Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja Modal Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi sudah siap pakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

C. Ukuran Pemerintah Daerah

1. Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu. Suatu Organisasi juga bisa diketahui besarnya melalui ukuran organisasi tersebut. Ukuran suatu organisasi dapat kita ketahui dari sudut pandang fisik maupun non fisiknya. Jika dihubungkan dengan konteks pengukuran kinerja, maka suatu organisasi tidak bisa diukur dengan fisiknya., melainkan harus diukur dari non fisiknya. Demikian juga pengukuran untuk mengukur suatu pemerintah daerah. Ukuran Pemerintah Daerah merupakan salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, Jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas.⁴¹ Cara mengukur dengan rumus sebagai berikut:

$$UPD = \frac{\text{Pendapatan (Pusat + Daerah)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

D. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

⁴¹ Kusumawardani, "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legeslatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia", Jurnal Fakultas Ekonomi UNNES Semarang

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat DAN Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.⁴²

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah, sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah

⁴² Manik Dan Tumpal, "Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi", Jurnal Organisasi Dan Manajemen Universitas Maritin Raja Ali Haji (UMRAH)

yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. Penghitungan Dana Perimbangan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Perimbangan} \\ &= \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} \\ &+ \text{Dana Alokasi Khusus} \end{aligned}$$

2. Pembagian Dana Perimbangan

Pada Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau Dana bagian daerah terdiri atas:

1. Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
2. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari Bea perolehan atas tanah

dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- b. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemetaan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadikan sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan Prasarana Pemerintah Daerah.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber permintaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah Adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan

daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴³

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

⁴³ Maryati Dan Endarawati. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol 5 No 2.

daerah masing-masing. Berdasarkan tiga pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari.

1) Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face* atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencukup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Tuntutan ganti rugi
- e. Komisi
- f. Potongan
- g. Keuntungan selisih kurs
- h. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

F. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal adalah investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin

banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Berdasarkan hal tersebut Belanja Modal berpengaruh negatif Terhadap kinerja Keuangan.⁴⁴

Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan. Peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumberdaya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja

⁴⁴ Alvini Dan Yevi, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Periode (2011)-(2016))", JOM FEB, 1 (1), Hal.1-15

pemerintah daerah tersebut. Sehingga ukuran pemerintah daerah yang besar maka kinerja keuangan semakin tinggi yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja keuangan yang buruk. Berdasarkan hal tersebut Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.⁴⁵

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang meliputi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Berdasarkan hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.⁴⁶

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal yaitu kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal

⁴⁵ Ayu Dan Putri Puspita, "Analisis PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se- Jawa Barat", *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 3 (1), Hal.80-96

⁴⁶ Budianto Dan Stanly W Alexander, "Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara", *JURNAL EMBA*, 4 (4), Hal.844-851

ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkait dengan daerah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah yang bersumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahnya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.. Pendapatan Asli Daerah yang sah, Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga naik (meningkat). Berdasarkan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

G. Penelitian Terdahulu

Prastiwi dan Aji melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah

⁴⁷ Darwanis Dan Ryanda Saputra, " Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1 (2), Hal.183- 199

daerah (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di daerah istimewa yogyakarta tahun anggaran 2013-2018).⁴⁸ Metode ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif dan dana khusus tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di daerah istimewa yogyakarta daerah, belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di daerah istimewa yogyakarta daerah (DIY). Hasil penelitian secara simultan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dana khusus, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode yang sama serta menggunakan variabel yang sama. Persamaan dengan penelitian ini terletak sama-sama menguji mengenai kinerja keuangan, sedangkan perbedaan terdapat pada subjek dan periode penelitian.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Sari Dan Halmawati bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota

⁴⁸ Nanda Dipa Prastiwi Dan Andri Waskita Aji, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018), *Jurnal Kajian Bisnis*, No.1 Vol. 28 Hal. 89-105

di provinsi sumatera barat.⁴⁹ Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja daerah umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian secara simultan bahwa pendapatan asli daerah, alokasi umum, belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel pendapatan asli daerah, alokasi umum, belanja daerah dan kinerja keuangan serta metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan yang ditemukan adalah penggunaan variabel alokasi umum dan belanja daerah, serta objek penelitian.

Saraswati dan Rioni bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁵⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh

⁴⁹ Berti Indah Sari Dan Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, No.1 Vol. 3 Hal 1-11

⁵⁰ Dwi Saraswati,S.Pd,M.Si dan Yunita Sari Rioni,SE,M.Si,Ak,CA, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *No.2 Vol.9 Issn 2087-4669*

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian ini sama menggunakan variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage dan kinerja kinerja keuangan pemerintah daerah serta menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian adalah adanya variabel leverage serta objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Ryadan Sapurta yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh).⁵¹ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linier berganda. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa secara persial bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan v

⁵¹ Darwanis dan Ryadan Sapurta, "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh), Jurnal diamika akutansi dan bisnis, no. 22 vol. 1 hal. 183-199

ariabel dan metode yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian yang diteliti.

Neni Nurhayati dan Amir Hamzah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁵² Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapatkan secara persial bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode yang sama serta menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian adalah penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi serta objek penelitian.

Sedangkan penelitian Andirfa, Basri Dan Majid bertujuan meneliti pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh.⁵³ Metode

⁵² Neni Nurhayati Dan Amir Hamzah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 1

⁵³ Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA Dan Dr. M.Shabri A.Majid,SE,M.Ec, "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh", Jurnal Magister Akuntansi, Issn 2302-0164

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan variabel bebas belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, serta variabel terikat menggunakan kinerja keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada objek penelitian.

Naukoko Dan Sumual melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten halmahera barat.⁵⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode regresi linier berganda. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli

⁵⁴ Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko Dan Jacline I, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, No. 5 Vol. 16

daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan variabel bebas pendapatan asli daerah dan belanja modal, serta variabel terikat menggunakan kinerja keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada objek penelitian.

Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmentalrevenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015).⁵⁵ Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, intergovernmentalrevenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Demikian pula bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan variabel bebas belanja modal, ukuran pemerintah

⁵⁵ Sri Mulyani Dan Hardiyanto Wibowo, "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)", No. 1 Vol. 5

daerah, intergovernmentalrevenue dan pendapatan asli daerah, serta variabel terikat menggunakan kinerja keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada objek penelitian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Husni, Erlina dan Rujiman bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di utara provinsi sumatera tahun 2013-2018.⁵⁶ Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Demikian pula bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas belanja modal sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan Diah Sari dan Mustanda bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan

⁵⁶ Yuanita Larosa Husni, Erlina Dan Rujiman, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Utara Provinsi Sumatera Tahun 2013-2018", No. 1 Vol. 4

asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁵⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada penggunaan metode analisis dan objek penelitian.

H. Kerangka Konseptual

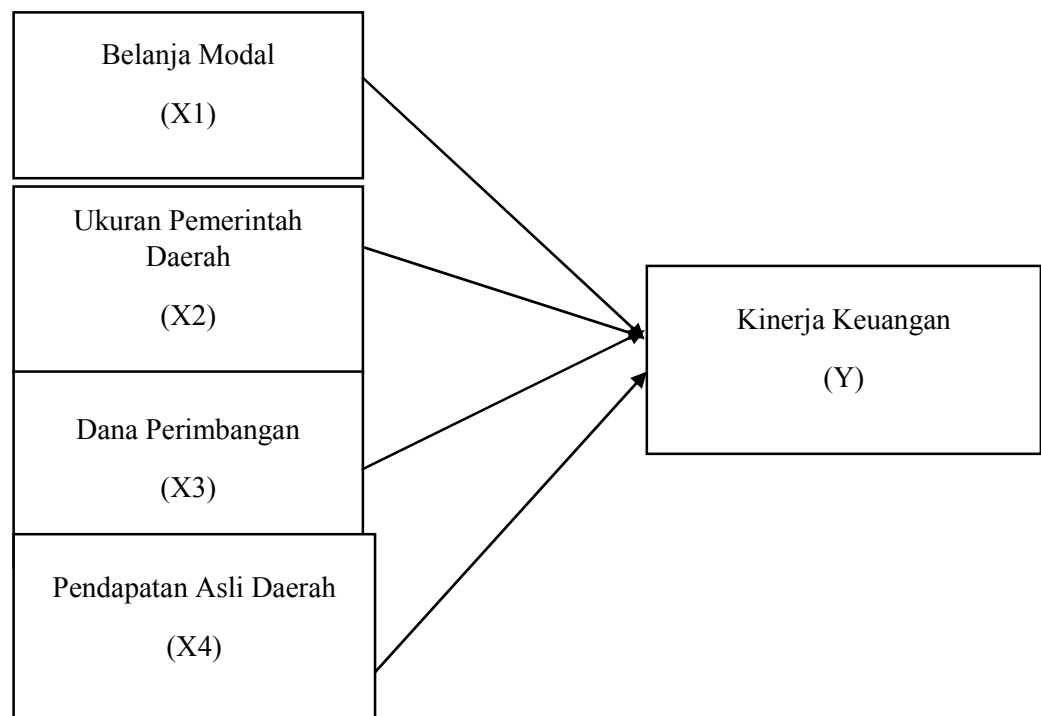
Pemikiran ini bisa dijadikan dalam bentuk kerangka pikir atau bisa disebut dengan kerangka konseptual untuk bisa dijadikan pedoman dalam menulis sehingga dapat diketahui variabel dominan diantara yang lainnya dalam memberikan pengaruh kinerja keuangan. Variabel yang terpakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu pertama variabel bebas berupa pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah. Kedua variabel terikat berupa kinerja keuangan.

Berikut skema dari kerangka pemikiran dari judul “Pengaruh Belanja Modal,

⁵⁷ Ni Made Diah Permata Sari Dan I Ketut Mustanda, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, E-Jurnal Manajemen, No. 8, Vol. 8

Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah salah satu bentuk pernyataan yang mempunyai sifat hanya sementara atau dapat disebut juga dugaan sementara, karena jawaban yang dipaparkan masih didasarkan dari teori dan belum didasarkan kepada fakta-fakta empiris yang terdapat pada proses pengumpulan data. Hipotesis merupakan perumusan yang didasarkan dari kerangka pikir dan dijadikan

sebagai jawaban yang bersifat hanya sementara didalam berbagai masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga melihat alasan diatas telah dijelaskan, maka hipotensis merupakan sesuatu yang penting untuk mengambil sebuah kesimpulan. Berlandaskan kenyataan yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis yang dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_1 = pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan

H_2 = pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan

H_3 = pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan

H_4 = pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan

H_5 = pengaruh kinerja keuangan terhadap kabupaten/kota di provinsi Jawa

Timur Tahun 2016-2020